

ORASI ILMIAH PENGUKUHAN JABATAN PROFESOR
BIDANG ILMU KEBIJAKAN PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



Prof. Dr. Dwiyanto Indiahono, S.Sos., M.Si.

**PENTINGNYA KEBIJAKAN MENARIK KE TENGAH
KONTROL POLITIK DAN INDEPENDENSI BIROKRASI
SEBAGAI REKONSILIASI PEJABAT POLITIK DAN BIROKRASI**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO

2023

**ORASI ILMIAH PENGUKUHAN JABATAN PROFESOR
BIDANG ILMU KEBIJAKAN PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**



**PENTINGNYA KEBIJAKAN MENARIK KE TENGAH
KONTROL POLITIK DAN INDEPENDENSI
BIROKRASI SEBAGAI REKONSILIASI PEJABAT
POLITIK DAN BIROKRASI**

**Oleh:
Prof. Dr. Dwiyanto Indiahono, S.Sos., M.Si.**

**Disampaikan pada Sidang Terbuka Senat
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
Kamis, 23 November 2023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO
2023**

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua...

Yang terhormat,

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Jenderal Soedirman;

Rektor, Para Wakil Rektor, dan seluruh jajarannya;

Para Pimpinan Fakultas, dan Lembaga serta segenap Civitas

Akademika Universitas Jenderal Soedirman;

Para hadirin, tamu undangan, dan kerabat yang kami hormati dan berbahagia,

Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wata'ala dalam segala keadaan, dalam suka cita maupun sedih nestapa. Sholawat serta salam tercurah kehadirat Nabi Muhammad Sholallahu 'Alaihi Wassalam, Nabi mulia, dan teladan zaman. Pada kesempatan kali ini, ijin kami menyampaikan Pidato Pengukuhan Guru Besar yang berjudul "Pentingnya Kebijakan Menarik ke Tengah Kontrol Politik dan Independensi Birokrasi sebagai Rekonsiliasi Pejabat Politik dan Birokrasi". Momen ini merupakan momen bersejarah bagi karir akademik kami, sekaligus bukti kontribusi bagi institusi tercinta, Universitas Jenderal Soedirman.

Hadirin yang budiman, ijin kami mengawali pidato pengukuhan Guru Besar ini dengan pantun:

Melancong ke Turki ke Hagia Sophia,

Janganlah lupa berbekal daun bidara;

Hari ini hari yang berbahagia,

Bisa bersua kolega, kerabat, dan saudara

Tikar digelar berhias permata,

Permata elok bersanding aglonema,

Gelar ini bukan gelar semata,

Gelar ini awal mengabdikan untuk sesama

Hadirin yang mulia, pada tahun-tahun ini relasi antara birokrasi dan partai politik semakin menarik untuk dikaji. Hal ini karena, pertama, tahun-tahun ini disebut tahun politik yang menunjuk aktivitas apa pun akan selalu dikaitkan dengan proses demokrasi Pilpres, Pilkada, dan Pileg. Jika bersin pada situasi normal akan bermakna wajar, maka di tahun politik, jumlah bersin bisa diinterpretasi kecenderungan seseorang dalam menentukan pilihan. Tahun-tahun politik semakin menambah hangat diskusi relasi birokrasi dan politik. Kedua, pada relasi pejabat politik dan birokrasi selalu ada relasi kuasa. Pejabat politik ingin mempertahankan atau memanfaatkan posisinya untuk meraup keuntungan politik (suara) dalam aktivitas yang dikelola administrasi. Pada sisi yang lain, birokrat yang tidak percaya diri, minim pengalaman, dan tidak sanggup berkompetisi lebih memilih melakukan manuver lobi-lobi politik untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi. Pelanggaran netralitas birokrasi pada ajang pemilu menjadi hal yang lazim (Purnawan, 2020). Kondisi simbiosis mutualisme ini terkadang semakin menjadi di tahun-tahun ini. Ketiga, pengalaman menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada birokrat yang melanggar prinsip netralitas ternyata hanya tajam kepada birokrat yang mendukung kandidat yang kalah, jika calon yang didukungnya menang atau petahana yang terjadi bukanlah penerapan hukuman (Simamora, 2018; Sutrisno, 2019). Keempat, pejabat politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat merasa dirinya memiliki kedaulatan rakyat secara utuh, dan merasa pihak yang berkuasa penuh untuk menentukan nasib pegawai birokrasi. Padahal, birokrasi memiliki aturan main sendiri, ia tidak bisa seenaknya mendapatkan promosi dan demosi. Birokrasi memiliki aturan merit yang harus dipenuhi dalam membangun profesionalismenya. Hubungan politik dan birokrasi memang selalu dihiasi dengan intervensi pejabat politik ke dalam birokrasi (Lestari, 2014; Nurprojo, 2014; Rustinsyah & Prasetyo, 2019; Verina et al., 2019).

Berdasarkan penelusuran kami, kajian pejabat politik-administrasi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah kajian-kajian yang hendak mendorong atau berupaya menjelaskan relasi birokrasi dan pejabat politik pada situasi normal dan atau menciptakan kondisi normal. Kondisi normal menunjuk bahwa relasi pejabat politik dan birokrasi telah memiliki pola relasi yang dewasa, masing-masing pihak seakan-akan selalu dapat bekerja sama sesuai dengan posisinya masing-masing, dan mengabaikan kesempatan bahwa masing-masing pihak memiliki potensi untuk dapat berbenturan. Kelompok Kedua pada sisi yang lain hendak menjelaskan kajian relasi birokrasi dan pejabat politik untuk mencegah konflik dan kondisi konflik. Kondisi konflik menunjuk terjadinya benturan kepentingan antara pejabat politik dan birokrasi, kondisi ini biasanya disebabkan adanya keinginan untuk saling mendominasi, dan terjadinya pelanggaran etika hukum dan atau birokrasi oleh salah satu atau kedua belah pihak.

Kajian-kajian yang berada di kelompok pertama lebih banyak melihat relasi pejabat politik dan administrasi sebagai hubungan yang dikotomi, yang menekankan tidak diperkenankannya administrator untuk memberikan alokasi nilai (dikotomi politik-administrasi) (Goodnow, 1900; Taylor, 1912; White, 1926; Willoughby, 1918; Wilson, 1887). Fenomena bersatunya pejabat politik dan birokrasi dalam hal kebijakan publik dan rekrutmen pejabat karier ini membantah dengan sendirinya paradigma dikotomi politik-administrasi. Posisi yang relatif berseberangan dengan pandangan dikotomi politik administrasi-meski tidak begitu populer-adalah kajian dominasi birokrasi, yaitu menunjuk birokrasi adalah pihak yang paling berkompeten dan berpengalaman dalam merancang kebijakan publik (birokrasi dominan) (Freeman, 1958; Meier, 1997; Miwa & Ramseyer, 2003; Muramatsu & Krauss., 1984). Pada kajian kelompok pertama ini, konsep *Principal Agent* merupakan perspektif yang paling populer untuk menjelaskan relasi pejabat politik dan birokrasi (American Political Science Association, 1989; Bendor et al., 1987; Miller, 2005;

Waterman & Meier., 1998). Konsep ini menekankan bahwa pejabat politik merupakan *principal* yang memberikan tugas kepada agent. Pada konsep *principal agent* ini terjadi perdebatan apakah agent boleh mengambil tindakan secara otonom atau tidak. Kajian selanjutnya dari kelompok pertama adalah Teknokrasi & Epistemic Drift yang meyakini bahwa birokrasi adalah pihak yang paling tepat dalam menyuplai pengetahuan kepada pembuat kebijakan, bentuk relasinya adalah birokrasi membantu pejabat politik dalam merancang kebijakan (Shapiro & Guston., 2006). Selanjutnya pada kelompok pertama ini juga ada kajian “Reining in theory of delegation” yang meyakini bahwa untuk membuat kinerja birokrasi efektif dan efisien, maka hubungan antara pejabat politik dan birokrasi diterjemahkan dalam bentuk rancangan prosedur administrasi secara ketat (Baum, 2007; Moe, 2006). Perspektif terakhir yang bisa diperhatikan pada kelompok pertama ini adalah untuk mencapai tingkat *complementarity* atau relasi yang saling melengkapi antara pejabat politik dan birokrasi maka Independensi Birokrasi dan Kontrol Politik Pejabat Politik harus berada pada level tinggi. Pendapat terakhir tentang komplementaritas dari Svava (2021) yang menyatakan bahwa independensi birokrasi dan kontrol politik yang tinggi akan menyebabkan komplementaritas inilah yang pada konteks Indonesia layak didebat. Kontrol politik dan independensi birokrasi pada level tinggi pada konteks Indonesia justru mengakibatkan konflik.

Kajian-kajian yang berada pada kelompok kedua menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya konflik antara pejabat politik dan birokrasi, pejabat politik harus bertindak secara elastis (tidak kaku) ketika berhadapan dengan birokrasi (*political elasticity*) (Werlin, 2001, 2008, 2012). Selain itu, ada juga konsep *Insulin bureaucracy* yang menunjuk bahwa untuk mencegah konflik nilai antara pejabat politik dan birokrasi, dan agar melindungi birokrasi dari intervensi dari aktor politik, birokrasi harus dipastikan netral dari pengaruh partai politik (Dunn & Legge Jr, 2002; Mueller, 2015). Singkatnya, birokrasi harus diasingkan dari hiruk pikuk politik praktis. Ahli lain menyatakan

bahwa upaya untuk mencegah konflik antara birokrasi dan pejabat politik maka harus dikembangkan sikap kesetaraan dan kemitraan (*partnership model*) (Dunn & Legge Jr, 2002). Pada kajian kelompok kedua ini, lahirlah konsep *thermostatic* yaitu pejabat politik harus menjaga suhu ruang kerja birokrasi berada level hangat sehingga birokrasi dapat bekerja secara efektif dan efisien (Jennings, 2009; Norman & Gregory, 2003).

Bapak/Ibu tamu undangan yang budiman,

Relasi pejabat politik dan birokrasi yang menarik inilah yang menjadikan kami, sejak awal menggeluti kajian relasi birokrasi dan pejabat politik di Indonesia, pada aspek kebijakan publik dan rekrutmen pejabat karir. Jika menilik sejarah, pada Era Orde Lama, pejabat politik dan birokrasi sudah didesain untuk dipisah. Pegawai negara tidak diperbolehkan menjadi pengurus dan anggota partai politik. Kondisi ini berbeda dengan kondisi birokrasi dan partai politik di Era Orde Baru. Birokrasi merupakan penopang utama Orde Baru selain Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dan Golongan Karya. Cengkeraman Orde Baru kepada Birokrasi dapat berjalan mulus melalui Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Suara Golkar pada Pemilu 1992 turun 5,06 persen padahal pada Pemilu 1987 suara Golkar naik 8,82 persen. Salah satu penyebabnya menurut pakar adalah bahwa Rudini selaku Mendagri melarang para Camat untuk melakukan Kampanye Golkar (Gaffar, 1993). Dampak turunnya suara Partai Golkar, KORPRI terpaksa merevisi AD/ART-nya. Beberapa perubahan signifikan diantaranya adalah ekstensifikasi KORPRI, dan hal ini membuahkan hasil kenaikan suara 6,41 persen pada Pemilu 1997. Fenomena ini menunjukkan bahwa mesin birokrasi dapat diandalkan dalam meraih suara pada Pemilu. Pada Era Orde Baru, potensi konflik antara pejabat politik dan birokrasi nyaris tidak ada, karena pejabat politik dan birokrat sama-sama di satu kubu, yaitu Golkar.

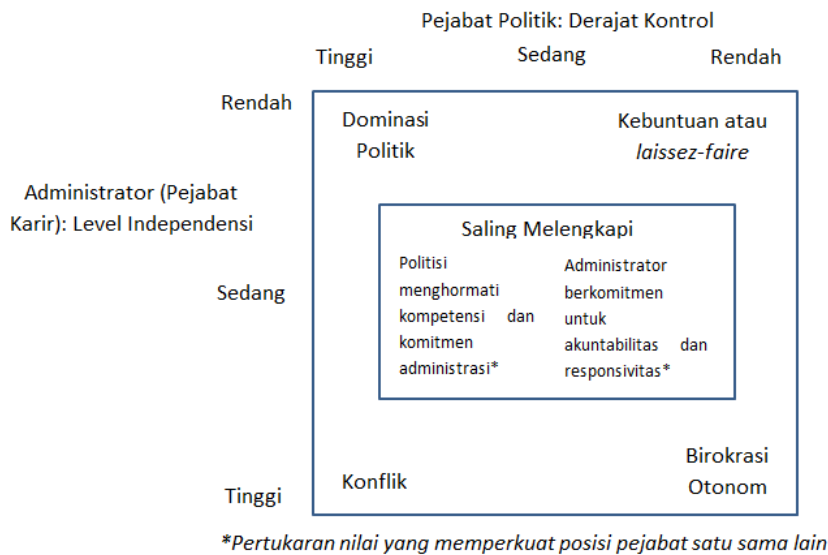
Pada Era Reformasi sebelum lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), berdasarkan penelitian kami di Kota Tegal menunjukkan relasi pejabat politik dan birokrasi yang baik. Pejabat politik bersedia berdiskusi dengan birokrasi dalam hal merancang kebijakan, melakukan promosi, rotasi, dan demosi pejabat. Rekrutmen PNS baru benar-benar berdasarkan hasil tes tanpa intervensi pejabat politik, karena pejabat politik merasa membutuhkan orang-orang pilihan untuk duduk di birokrasi. Memo titipan dari banyak kolega dan kerabat cukup disimpan di laci. Relasi antara pejabat politik dan birokrasi yang harus cair disadari sebagai modal utama dalam mengembangkan jalannya pemerintahan. Pada Konteks Kota Tegal, pemimpin yang mempraktikkan kondisi saling melengkapi ini adalah satu-satunya walikota yang lolos dari tindak pidana korupsi sejak tahun 1999 hingga 2019.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Pada Era Reformasi pasca UU ASN, kontrol politik oleh pejabat politik semakin meninggi hal ini karena pemilihan kepala daerah secara langsung mengakibatkan kepala daerah merasa memiliki kedaulatan rakyat yang kuat, sehingga seakan-akan memiliki hak prerogatif untuk mengendalikan birokrat secara otonom. Pada sisi yang lain, UU ASN mendorong lahirnya independensi birokrasi yang lebih tinggi dengan bentuk pejabat politik tidak boleh memindah pejabat pimpinan tinggi pratama sebelum 2 tahun, dan adanya panitia seleksi untuk mengangkat pejabat pimpinan tinggi pratama di daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah yang memimpin Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah Badan Daerah dan jabatan lain yang setara dengan jabatan eselon II. Model Svara (Svara, 2001) yang menyatakan bahwa komplementaritas hubungan pejabat politik dan birokrasi akan membaik jika keduanya berada pada level tinggi pada konteks Indonesia tidaklah terbukti. Pada konteks Indonesia, yang terjadi ketika kontrol politik dan independensi birokrasi tinggi adalah

konflik antara pejabat politik dan birokrasi. Sehingga, untuk melakukan rekonsiliasi atas konflik ini diperlukan upaya menarik ke tengah kontrol politik dan independensi birokrasi di Indonesia. Konflik antara pejabat karir dan pejabat politik ini kemudian membawa kepada situasi yang berbahaya yaitu pejabat karir menjadi tidak efisien dan pejabat politik menjadi tidak responsif (Karl, 1987).

Gambar 1. Modifikasi Model Svara – Memahami Interaksi antara Politisi dan Administrator



Sumber: Indiahono (2019)

Modifikasi Model Svara ini menunjukkan bahwa relasi pejabat politik dan birokrasi (politik-administrasi) dalam kebijakan publik dan rekrutmen pejabat kemungkinan akan menimbulkan lima kondisi, yaitu **Pertama**, jika derajat kontrol politik tinggi dan independensi birokrasi rendah maka akan terjadi dominasi politik. **Kedua**, jika derajat kontrol sedang dan independensi birokrasi juga sedang yang terjadi adalah komplementaritas [kondisi ideal]. **Ketiga**, jika derajat

kontrol politik tinggi dan independensi birokrasi juga tinggi, yang terjadi adalah konflik. **Keempat**, jika derajat kontrol politik rendah, dan independensi birokrasi rendah maka akan terjadi *laissez faire*. **Kelima**, jika derajat kontrol rendah, dan independensi birokrasi tinggi maka akan terjadi birokrasi otonom (Indiahono, 2019).

Penelitian kami di Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan Kebumen menemukan bahwa fenomena “sowan”-yang biasa dilakukan elit birokrasi- dalam perspektif birokrasi menandakan persahabatan, kesetiaan, pendekatan, dan negosiasi. Penelitian ini berkonsentrasi menjelaskan kekuatan birokrasi paternalistik, yang umumnya dimulai pada fase akhir proses pemilihan kepala daerah yang demokratis. Secara konseptual, penelitian ini menjelaskan lahirnya birokrasi paternalistik baru di era demokrasi pada pemerintahan daerah di Indonesia. Studi ini merekomendasikan pentingnya penegakan hukum bagi pelanggar netralitas birokrasi tanpa diskriminasi, peningkatan hubungan antara pejabat politik dan pejabat birokrasi yang mencerminkan kemitraan yang lebih baik dalam rekrutmen pejabat karir, dan pentingnya birokrat yang berkomitmen untuk menjaga prinsip merit dalam pemilihan pejabat daerah (Indiahono et al., 2022). Hal ini penting karena penyimpangan pengangkatan pejabat birokrasi diwarnai diskriminasi, karena adanya praktik patronase, sistem keluarga, dan spoil system (Agustino & Fahrul, 2018; Firas, 2016; Nugroho et al., 2020; Rahardi et al., 2020).

Pada proses demokrasi pemilihan secara langsung, birokrasi memang berada pada kondisi yang tidak menguntungkan. Pada satu sisi lain dikehendaki oleh UU untuk netral, tetapi acapkali oleh kepala daerah dipaksa dibawa dalam pusaran aktivitas politik praktis. Kondisi ini memang menyedihkan. Meski demikian, penelitian kami menunjukkan bahwa netralitas birokrasi pada konteks PNS akar rumput Kabupaten Banyumas pada Pilkada terakhir menunjukkan angka yang cukup menggembirakan. Tingkat netralitas birokrasi di Banyumas berada pada level yang baik yaitu pada angka 3,18 atau 79,59. Indikator yang menunjukkan nilai tinggi adalah tidak

menunjukkan dukungan kepada salah satu Calon Bupati Non Petahana di media sosial, tidak menunjukkan dukungan kepada salah satu Calon Bupati Petahana di media sosial, dan tidak merespon Tim Sukses Calon Bupati Petahana yang meminta ASN untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan Petahana. Sedangkan, indikator netralitas birokrasi terendah adalah ditunjukkan pada indikator memegang prinsip netralitas ketika melihat teman ASN memberikan dukungan kepada salah satu bupati non petahana dan petahana di media sosial, serta memegang prinsip untuk tidak memberi dukungan kepada bupati non petahana atau petahana (Indiahono, 2022a). Hasil penelitian ini cukup menggembirakan karena memberi sinyal birokrasi masih bisa bertindak netral dalam arena Pilkada langsung.

Penelitian kami tentang fenomena sowan, dan indeks netralitas birokrasi menunjukkan fenomena yang unik, pada tingkat elit birokrasi cenderung lebih kuat untuk ikut arus aktivitas politik, sedangkan pada arus bawah birokrasi cenderung lebih bisa menegakkan netralitas birokrasi. Kajian-kajian ini memberi pesan bahwa penegakan pelanggaran netralitas birokrasi dapat lebih difokuskan pada elit birokrasi daripada birokrasi akar rumput. Asas netralitas harus dapat mendorong birokrasi untuk bersikap profesional, patriotik, dan pro-publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Indiahono, 2022b).

Kondisi kontrol politik yang tinggi terhadap birokrasi, dan kondisi yang tinggi pula pada independensi birokrasi telah menjadi masalah tersendiri di Era Reformasi pasca UU ASN. Oleh karena itu, perlu kiranya menarik kontrol-politik dan independensi birokrasi menjadi lebih ke tengah. Pejabat politik harus mau terbuka mendialogkan visi-misi politiknya kepada birokrasi, dan birokrasi berani menyatakan pendapat untuk menyelaraskan ejawantah visi misi tersebut ke dalam birokrasi berbasis bukti. Pada konteks rekrutmen pejabat birokrasi, pejabat politik harus sadar bahwa sejatinya ia memerlukan juga birokrasi handal, cerdas, dan berintegritas untuk membantu mencapai visi dan misi kampanyenya. Pejabat politik

diharapkan tidak melakukan *counter staffs* secara berlebihan. *Counter staffs* adalah upaya mengganti posisi-posisi strategis dalam tubuh birokrasi untuk memastikan adanya kerjasama (Sukmajati, 2013). Pejabat politik yang memilih pejabat birokrasi hanya karena memberi dukungan politik akan berisiko menurunkan kinerja birokrasi. Saat pemilihan pejabat birokrasi, pejabat politik harus membuka diri menerima masukan dari pejabat birokrasi, dan pada sisi yang lain birokrasi harus berkomitmen untuk melalui seleksi rekrutmen pejabat karir secara berintegritas. Hal inilah yang dimaksud komplementaritas oleh Svava (Svava, 2001), dan *partnership* oleh Dunn dan Legge Jr. (Dunn & Legge Jr, 2002). Upaya pejabat politik untuk menjaga suhu ruang kerja birokrasi berada level hangat sehingga birokrasi dapat bekerja secara efektif dan efisien inilah yang disebut Norman dan Gregory (Norman & Gregory, 2003), dan Jennings (Jennings, 2009) dengan konsep *thermostatic*.

Pada sisi yang lain birokrasi pun harus terus meningkatkan profesionalisme, menunjuk bukan hanya kompeten secara konsep dan teknis, tetapi juga mampu membuka pintu dialog atas kebijakan yang akan diambil oleh pejabat politik. Birokrasi harus mampu menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (Giest, 2017; McBeth & Lybecker, 2018), memanfaatkan big data (Hong et al., 2019; Mureddu et al., 2020), dan menghindari kebijakan yang berbasis asumsi, hoax dan opini (Faedlulloh & Duadji, 2019; McHale, 2019). Birokrasi di era sekarang pun dituntut untuk mampu menjadi data analyst (Gouri & Uddin, 2019; Merhi & Bregu, 2020; Tonidandel et al., 2018), memanfaatkan teknologi informasi (Goparaju & Ahmad, 2019), dan beradaptasi dengan dunia yang berbasis artificial intelligence (Brunetti et al., 2020; Loukis et al., 2020; Mohd Satar et al., 2021). Birokrasi juga harus berani berkata “tidak” secara lantang kepada pejabat politik yang hendak berbuat curang dalam kebijakan dan rekrutmen pegawai.

Pada pidato pengukuhan ini, secara substansi merekomendasikan upaya menarik ke tengah kontrol politik dan

independensi birokrasi demi terciptanya rekonsiliasi dan komplementaritas di antara keduanya. Upaya untuk menarik ke tengah kontrol politik dan independensi birokrasi pada konteks Indonesia ini merupakan peran strategis dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN dengan demikian memiliki peran strategis yang dapat disahihkan secara konseptual maupun praktis. Ketika beberapa pekan lalu KASN resmi dibubarkan, maka perlu dicari solusi siapa yang akan bisa menarik ke tengah kontrol politik dan independensi birokrasi?. Hal ini menjadi penting untuk dipikirkan agar kontrol politik dan independensi birokrasi dapat benar-benar ada di tengah, dan diharapkan mampu menjadikan pemerintah dapat benar-benar menjadi pelayan publik. Kondisi ini akan memperbesar kesempatan tegaknya pemerintah yang mampu membangun kebijakan dan pelayanan publik yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bapak/Ibu hadirin yang budiman dan kami hormati,

Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami menyampaikan terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu hingga bisa berdiri tegak di sini.

Terima kasih yang pertama disampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang telah menetapkan kami sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Kebijakan Publik FISIP Universitas Jenderal Soedirman per 1 Juni 2023. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Jenderal Soedirman beserta jajaran pimpinan universitas yang telah membantu segala proses pengusulan hingga pengukuhan Guru Besar kami.

Terima kasih yang utama amat layak disampaikan kepada orang tua kami, Ayah kami, Bapak Sugiyanto, dan Ibunda Subandiyah dari Rembang, serta Ayahanda Mertua Bapak Lalu Syahrin [alm] dan Ibunda Mertua Mamak Baiq Ainun dari Lombok Tengah. Ridho dan doa-doa mereka telah membuka banyak kemudahan, sehingga saya bisa ada di titik ini. Terima kasih secara khusus wajib saya sampaikan

kepada Ibunda tercinta, karena kebaikan-kebaikan, dan doa-doanya lah yang menjadikan saya bisa berdiri di sini lebih cepat. Semoga semua orang tua kami selalu sehat, diberi umur yang berkah, selalu sehat dan bahagia.

Terima kasih dan untaian cinta saya sampaikan kepada Istri tersayang dan ibu dari anak-anakku: dr. Baiq Arnany Vandari, anak-anakku tersayang yang menjadi kebanggaan: Fadiya Jauza Zuhra, Fathul Azzam Dhiyaulhaq dan Fakhira Arifah Dzikra. Terima kasih banyak sudah sabar mendampingi Ayah saat sakit, dan harus mengarungi masa-masa kritis dan mendebarakan tahun lalu. Terima kasih banyak sudah memberikan kedamaian, pengertian, dan dukungan penuh sehingga Ayah bisa ada di titik ini. Ayah mohon maaf, jika ayah kadang harus mengorbankan waktu bersama keluarga untuk aktivitas akademik. Sungguh cinta kalianlah yang membuat ayah kuat, dan yakinlah Ayah sungguh menyayangi kalian semua.

Terima kasih disampaikan kepada Keluarga Rembang: Mas Widi dan Mbak Septi, Dik dr. Putik dan Dik Dr. Fani Spesialis Anestesi, terima kasih banyak untuk dukungan selama ini. Keluarga Lombok: Kak Iwan, Mbok Oning, Kak Ari, Mbak Efi, Memey Meli, Mas Agus, Mas Agus Purworejo, dan seluruh keponakan, terima kasih untuk semua dukungan. Terima kasih kepada Bibi-Bibi kami: Bi Baiq Adriani, dan Bi Baiq Kasiani dari Lombok Tengah yang telah menyempatkan untuk hadir pada hari ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Keluarga Besar Wirodikromo Pacitan, Keluarga Besar Eyang Gito Sragen, Keluarga Besar Datuk Jaelan Kopang NTB, dan Keluarga Besar Sengkol NTB. Semoga pengukuhan ini bisa membanggakan keluarga besar semua.

Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Dr. Israwan Setyoko, M.S. yang telah dan terus memberi energi positif untuk terus membaca tulisan-tulisan terbaru, memberi pendampingan, dan memotivasi untuk terus maju ke Guru Besar. Prof. Israwan adalah juga Pemberi Rekomendasi kami untuk Kuliah S2 di MAP UGM 2004, dan menjadi Penguji eksternal kami pada Program Doktor Manajemen dan

Kebijakan Publik UGM 2019. Prof. Dr. Slamet Rosyadi, M.Si. yang telah mendampingi dan memaksa saya untuk akrab dengan jurnal dan dunia reviewer jurnal bereputasi. Kedua Bapak Professor ini adalah guru dan teladan kami.

Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Dr. Agus Dwiyanto [Alm], Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, dan Prof. Dr. Agus Pramusinto, tiga “Agus” Sang Begawan Administrasi Publik Indonesia yang telah banyak membimbing, menginspirasi, dan memotivasi untuk melakukan riset secara lebih baik dari waktu ke waktu. Terima kasih kepada Ibu Bevaola Kusumasari, PhD. yang juga telah nekad menjerumuskan saya untuk menulis jurnal dan menjadi reviewer pada Jurnal Internasional Bereputasi, dan Nasional Terakreditasi. Bu Ola yang menjadi Sekjen IAPA, juga banyak menyeret kami beraktivitas di jalur akademik yang menyenangkan, salah satunya menjadi Pembicara pada Program Indonesia Makin Cakap Digital sejak tahun 2021. Terima kasih untuk guru-guru kami di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM: Prof. Keban, Prof. Muhajir, Prof. Kumoro, Bu Ambar Widaningrum, Pak Gebi, Pak Eli, Bu Maria, dan Pak Bando.

Terima kasih untuk guru-guru kami di SD Kutoharjo 2 Kabupaten Rembang: Bu Puspo, Pak Darwolo, dan Pak Gufron; guru-guru kami di SMP Negeri 2 Rembang, dan SMA Negeri 1 Rembang: Ustadz Tahsinul Fuad, Ustadz Maftuh, Pak Gito, Pak Gunoto, Bu Susi, Bu Galuh, Bu Endah, dan Pak Karlan. Terima kasih banyak untuk ilmu yang telah diberikan, berkat Bapak Ibu semualah saya bisa tegak berdiri di sini. Terima kasih untuk konco kenthel Mas Seno, Mas Dr. Bambang Kun, Mas Fajar, Mas Eka Cahya, dan Mas Bambang Sumiyanto yang telah menjadi sahabat karib sejak lama.

Terima kasih untuk Mas Kajur Doktor Tobirin yang telah menjadi teman asyik saat berjuang di Jogja, menjadi atasan yang baik di Jurusan AP, serta soulmate keren saat mengerjakan proyek-proyek penelitian dan pengabdian. Semoga langkah menuju Guru Besar juga dimudahkan untuknya. Ibu Dr. Wahyuningrat, Pak Dr. Luthfi Makhasin, Pak Dr. Alizar Isna, Bu Dr. Tri Wuryaningsih, Pak Prof.

Slamet Rosyadi, Bu Dr. Mite Setiansah, dan Bu Dr. Tyas Retno Wulan jajaran Dekanat yang banyak membantu dan mendukung saya dalam mengerjakan tugas sebagai Korprodi, tugas tri dharma perguruan tinggi, maupun usulan guru besar.

Terima kasih disampaikan kepada Bapak Pawrtha Dharma, M.Si. Nama ini adalah nama yang paling wajib kami sebut pada moment ini karena beliau adalah dosen Pembimbing Akademik saya saat S1, dan berkat beliau pulalah saya percaya diri untuk mendaftar menjadi dosen. Beliaulah yang menelepon saya memberitahukan bahwa ada formasi dosen di 2005, dan dari beliau saya juga banyak belajar tentang makna berintegritas dalam segala keadaan.

Terima kasih disampaikan kepada Ibu Dr. Dyah Retna Puspita dan Almarhum Bapak Suparman, M. Si, dua dosen pembimbing skripsi saya. Para Senior dan kolega di Jurusan Administrasi Publik: Pak Bahtar, Pak Swastha, Bu Duswati (almh), Pak Imron (alm), Pak Anwar, Pak Mahmud dan Bu Ida, Pak Andi Antono, Pak Guntur, Pak Bambang Tri, Pak Ali, Pak Karso, Pak Simin, Pak Muslih dan Bu Lilis, Pak Abdul, Pak Darmanto, Pak Ngalmun, Mbak Denok, Mas Sendy, Mbak Hikmah, Mas Shadu, dan Bu Tri Yumarni yang telah menjadikan kampus paling nyaman untuk membongkar paket yang berisi hal serius, dan hal yang penuh canda tawa.

Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Dr. Muhammad Fauzan, Dekan Fakultas Hukum Unsoed yang juga telah menjadi motivator ulung untuk berani maju ke Guru Besar. Upaya Prof. Fauzan untuk memaksa saya foto di kursi Profesornya amat membekas. Terima kasih Prof. Para Senior di Fakultas Hukum, Prof. Aziz, Prof. Kadar, Pak Kartono, Mas Tedi, Bu Riris, Bu Kunarti, dan Mbak Ayu yang telah menjadi teman-teman yang asyik untuk menyusun naskah akademik, dan penelitian. Bapak/Ibu ini juga memberikan pelajaran untuk gigih mentransfer ide menjadi narasi empirik dalam kebijakan.

Terima kasih juga disampaikan kepada Dewan Redaksi Jurnal Nasional Terakreditasi yang dalam beberapa tahun terakhir menarik saya sebagai pembaca pertama dan pereview artikel yang keren-keren

di: Jurnal Bina Praja dan Jurnal Matra Pembaruan Kementerian Dalam Negeri, Jurnal Bestuurskunde Setjen Kemendagri, Jurnal Borneo Administrator LAN Samarinda, Jurnal Policy & Governance Review IAPA, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik FISIPOL UGM, Jurnal Bisnis dan Administrasi Universitas Indonesia, dan Jurnal Pendidikan Geografi Universitas Negeri Malang. Pak Erwin, dan teman-teman di PAK Universitas; Bu Suswati, Pak Dirkam, Bu Wiwin, Mbak Atin, dan teman-teman di Kepegawaian FISIP Unsoed yang telah banyak membantu dalam proses usulan guru besar ini. Seluruh Panitia Pengukuhan Guru Besar yang dikomandani Bu Ikoh, terima kasih banyak.

Terima kasih disampaikan kepada Jajaran pimpinan, manajemen, dan karyawan RSUD Ajibarang, yang secara langsung maupun tidak langsung turut mendukung pencapaian ini. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu dr. Dani Esti Novia, Ibu dr. Widyana Grehastuti, Sp.OG, dan Bapak dr. Noegroho Harbani. M.Sc., Sp.S. yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan penyelesaian tugas-tugas istri saya di RSUD Ajibarang, yang itu berarti membantu saya juga.

Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak-Ibu tetangga kami di Perumahan Pasir Luhur Permai, dan Jamaah Masjid Al-Muhajirin: Pak Dr. Ahmad Muttaqin, Pak Dr. Lendra Yuspi Geasill, Pak RT Ahmad Muthohar, S.Pt., Pak Ustadz Yoyon Swastiono, S.Ag., Pak Yusuf, Mas Eko Gunarto, Pak Drh. Sahda Halim, Pak Sahidin, Pak Isnandar, Pak Sirin, Pak Apit, Pak Welly, Pak Tri, Pak Sugeng, dan lain-lain yang telah menjadi kawan yang nyaman untuk meluruhkan lelah dan kesah urusan kampus, dan menggantinya dengan segenggam canda. Terkhusus untuk Mas Kiki Indrayanto, tangan kanan sekaligus saudara yang dapat diandalkan yang telah banyak membantu menyelesaikan urusan-urusan domestik masjid, dan rumah.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada keluarga induk semang kos saat S1, S2 dan S3: Keluarga Besar Bapak Kusyanto dan Bapak Pardan, serta Keluarga Besar Bapak Ulun. Saat

kami tak bisa keluar kos, nasi goreng buatan Bu Kusyanto, terasa amat nikmat dan berkesan untuk kami. Teman-teman Kos Paku Institute: Mas Arif Budaya, Mas Adit, Mas Arbi, Mas Bambang Sumiyanto, Mas Hendri, dll. Teman-teman Kos Biru: Mas Maulana, Mas Andre, Mas Wahid, Mas Mundzir, Mas Dian, Mas Redy, Mas Oki, dan Mas Koko.

Terima kasih disampaikan kepada Keluarga Besar Ikatan Keluarga FISIP Universitas Jenderal Soedirman (IKAFU), Mas Dr. Barid, Mas Latif, Mas Adha, Mbak Dian, dan kawan senior yunior maupun yang seangkatan; Teman-teman AP Unsoed 99, MAP UGM 38, dan S3 MKP UGM 2014: Mbak Dr. Rahayu, Mas Dr. Lauren dan Mas Dr. Obed. Teman-teman di HMJ-AN/HMJ AP, dan UKI FISIP Unsoed. Terima kasih juga disampaikan kepada Ustadz Furqon, dan Ustadz Ali Mubarak di Pondok Pesantren Nurul Huda Kutasari Purbalingga, Pak Karseno, PhD., Pak Madi Hakim, Pak Idang, Pak Kharisun, Mas Maryoso Owner KMC dan Ketua Jaringan Santri Pengusaha, Bapak/Ibu di Yayasan Darul Furqon yang juga banyak mewarnai perjalanan spiritual, mengajarkan makna perjuangan, dan ketaatan kepada Ilahi.

Terima kasih tiada terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kami sehingga kami bisa tegak berdiri di sini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tangan dan kaki ini terlalu kecil untuk membimbing kami ada di titik ini. Uluran tangan Bapak/Ibu, Saudara/Saudarilah yang membuat saya kuat hingga sampai di sini.

Ijinkan di ujung pidato ini, kami juga menutupnya dengan pantun:

Biola elok dibawa ke Balikpapan
Naik perahu makan teri dan ikan
Bila ada salah kata salah ucapan
Sudilah tuan puan ringan maafkan

Padi digiling bersisa jerami,
Jerami diikat bentuk persegi,

Cukup sekian pidato kami,
Bila ada umur bersua lagi

Mohon maaf untuk semua kekurangan, terima kasih untuk semua perhatian. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Daftar Pustaka

- Agustino, L., & Fahrul, S. (2018). *Patronase dalam Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018*. 3(1).
- American Political Science Association. (1989). Principal-Agent Models of Political Control of Bureaucracy. *The American Political Science Review*, 83(3), 965–978.
- Baum, J. (2007). Reining in the Bureaucrats: Democratic Transition and Administrative Procedural Reform in Korea. *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, 20(2), 233–254.
- Bendor, J., Taylor, S., & Gaalen, R. Van. (1987). Politicians , Bureaucrats , and Asymmetric Information. *American Journal of Political Science*, 31(4), 796–828.
- Brunetti, F., Matt, D. T., Bonfanti, A., De Longhi, A., Pedrini, G., & Orzes, G. (2020). Digital transformation challenges: strategies emerging from a multi-stakeholder approach. *The TQM Journal*, 32(4), 697–724. <https://doi.org/10.1108/TQM-12-2019-0309>
- Dunn, D. D., & Legge Jr, J. S. (2002). Politics and Administration in U.S. Local Governments. *Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART*, 12(3), 401–422.
- Faedlulloh, D., & Duadji, N. (2019). Birokrasi dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara di Era Post-Truth. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(3), 313–332. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i3.566>
- Firnas, M. A. (2016). Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Indonesia Era Reformasi. *Jurnal Review Politik*, 06(01), 160–194.
- Freeman, J. L. (1958). The Bureaucracy in Pressure Politics. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 319(Sep, 1958), 10–19.

- Gaffar, A. (1993). *Golkar dan Demokratisasi di Indonesia*. Aditya Media dan PPSK.
- Giest, S. (2017). Big data for policymaking: fad or fasttrack? *Policy Sciences*, 50(3), 367–382. <https://doi.org/10.1007/s11077-017-9293-1>
- Goodnow, F. (1900). *Politics and Administration: A Study in Government*. Russel & Russel.
- Goparaju, L., & Ahmad, F. (2019). Analyzing the risk related to climate change attributes and their impact, a step towards climate-smart village (CSV): a geospatial approach to bring geaponics sustainability in India. *Spatial Information Research*, 27(6), 613–625. <https://doi.org/10.1007/s41324-019-00258-0>
- Gouri, V., & Uddin, M. (2019). An Empirical Study of Big Data Analytics in Rural Arena. *International Journal of Social Sciences & Educational Studies*, 5(3). <https://doi.org/10.23918/ijsses.v5i3p192>
- Hong, S., Hyoung Kim, S., Kim, Y., & Park, J. (2019). Big Data and government: Evidence of the role of Big Data for smart cities. *Big Data and Society*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.1177/2053951719842543>
- Indiahono, D. (2019). *Dinamika Relasi Pejabat Politik dan Birokrasi Tingkat Lokal pada Era Orde Baru dan Era Reformasi (Studi Kasus di Kota Tegal)*. Universitas Gadjah Mada.
- Indiahono, D. (2022a). Bureaucratic Neutrality Index in Direct Regional Head Elections : Optimism in Developing Professional Bureaucracy in Indonesia. *Public Policy and Administration*, 21(3), 249–261. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5755/j01.ppaa.21.3.31788>
- Indiahono, D. (2022b). Dynamics of Bureaucratic Neutrality Policy in Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 18(3), 309–320. <https://doi.org/10.24258/jba.v18i3.1104>
- Indiahono, D., Satyawan, D. S., & Yamin, M. (2022). Understanding Sowan as a New Paternalistic Bureaucracy Pattern of Local

- Officials in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 14(2), 201–211.
<https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.201-211>
- Jennings, W. (2009). The Public Thermostat, Political Responsiveness and Error-Correction: Border Control and Asylum in Britain, 1994–2007. *British Journal of Political Science*, 39(4), 847–870.
- Karl, B. D. (1987). The American Bureaucrat: A History of a Sheep in Wolves' Clothing. *Public Administration Review*, 47(1), 26–34.
<https://doi.org/10.2307/975469>
- Lestari, P. (2014). Politik dan Birokrasi : Netralitas Birokrasi Kota Semarang pada Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014. *Forum Ilmu Sosial*, 41(2), 155–168.
- Loukis, E. N., Maragoudakis, M., & Kyriakou, N. (2020). Artificial intelligence-based public sector data analytics for economic crisis policymaking. *Transforming Government: People, Process and Policy*. <https://doi.org/10.1108/TG-11-2019-0113>
- McBeth, M. K., & Lybecker, D. L. (2018). The Narrative Policy Framework, Agendas, and Sanctuary Cities: The Construction of a Public Problem. *Policy Studies Journal*, 46(4), 868–893.
<https://doi.org/10.1111/psj.12274>
- McHale, J. P. (2019). Mass Media, Social Control, and Political Authority in a Post-Truth Environment. In C. E. Rabe-Hemp & N. S. Lind (Eds.), *Political Authority, Social Control and Public Policy* (Vol. 31, pp. 259–273). Emerald Publishing Limited.
<https://doi.org/10.1108/S2053-769720190000031017>
- Meier, K. J. (1997). Bureaucracy and Democracy: The Case for More Bureaucracy and Less Democracy. *Public Administration Review*, 57(3), 193–199.
- Merhi, M. I., & Bregu, K. (2020). Effective and efficient usage of big data analytics in public sector. *Transforming Government: People, Process and Policy*. <https://doi.org/10.1108/TG-08-2019-0083>
- Miller, G. J. (2005). The Political Evolution Of Principal-Agent Models. *Annu. Rev. Polit. Sci.*, 8, 203–225.
-

- Miwa, Y., & Ramseyer, J. M. (2003). Capitalist Politicians, Socialist Bureaucrats? Legeds of Government Planning from Japan. *The Antitrust Bulletin*, 595–627.
- Moe, T. M. (2006). Political Control and the Power of the Agent. *Journal of Law, Economics, & Organization*, 22(1), 1–29.
- Mohd Satar, N., Saifullah, M. K., Masud, M. M., & Kari, F. B. (2021). Developing smart community based on information and communication technology: an experience of Kemaman smart community, Malaysia. *International Journal of Social Economics*, 48(3), 349–362. <https://doi.org/10.1108/IJSE-05-2020-0325>
- Mueller, H. (2015). Insulation or Patronage: Political Institutions and Bureaucratic Efficiency. *BEJ. Econ. Anal. Policy*, 15(3), 961–996.
- Muramatsu, M., & Krauss., E. S. (1984). Bureaucrats and Politicians in Policymaking: The Case of Japan. *American Political Science Review*, 78(1), 12–146.
- Mureddu, F., Schmeling, J., & Kanellou, E. (2020). Research challenges for the use of big data in policy-making. *Transforming Government: People, Process and Policy*. <https://doi.org/10.1108/TG-08-2019-0082>
- Norman, R., & Gregory, R. (2003). Paradoxes and Pendulum Swings: Performance Management in New Zealand's Public Sector. *Australian Journal of Public Administration*, 62(4), 35–49.
- Nugroho, K. S., Warsono, H., & Yuniningsih, T. (2020). Birokrasi di Indonesia: Kasus Penempatan Pegawai, Politisasi Birokrasi atau Merit System? *Journal of Public Administration and Local Governance*, 4(2), 96–110. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v4i1.2394>
- Nurprojo, I. S. (2014). Merit System dan Politik Birokrasi di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 8(1), 45–52.

- Purnawan, H. (2020). *Pelanggaran Netralitas ASN Pilkada 2020, Bawaslu Kirim 369 Laporan Kepada KASN*. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/pelanggaran-netralitas-asn-pilkada-2020-bawaslu-kirim-369-laporan-kepada-kasn>
- Rahardi, F. H., Daffa, A. B., Ajeng, T., & Partotaruno, M. Y. (2020). Spoil System Sebagai Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Digitalisasi. *Prosiding Simposium Nasional "Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Revolusi Indusri 4.O"*, 0(0), 1378–1401. <https://www.tribunnews.com/regional/2018/03/30/asman-abnur-penyakit-birokrasi-di-indonesia->
- Rustinsyah, R., & Prasetyo, R. A. (2019). Stakeholder engagement in a water user association for agricultural irrigation management in the villages in Indonesia. *Journal of Water and Land Development*, 40(1), 181–191. <https://doi.org/10.2478/jwld-2019-0020>
- Shapiro, S., & Guston., D. (2006). Procedural Control of the Bureaucracy, Peer Review, and Epistemic Drift. *Journal of Public Administration Research and Theory – JPART*, 17, 535–551.
- Simamora, B. (2018). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(2), 215–229. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.2071>
- Sukmajati, M. (2013). Relasi Birokrat dan Politisi: Penjelajahan Konsep. In A. Elisabeth, D. Mariana, & A. Irewati (Eds.), *Evaluasi Reformasi Birokrasi di Indonesia*. AIPI.
- Sutrisno, S. (2019). Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 521–543. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5>
- Svara, J. H. (2001). The Myth of the Dichotomy: Complementarity of Politics and Administration in the Past and Future of Public Administration. *Public Administration Review*, 61(2), 176–183.

- Taylor, F. W. (1912). *Scientific Management*. Except from: Testimony before the US House of Representatives, Januari 25, 1912.
- Tonidandel, S., King, E. B., & Cortina, J. M. (2018). Big Data Methods: Leveraging Modern Data Analytic Techniques to Build Organizational Science. *Organizational Research Methods*, 21(3), 525–547. <https://doi.org/10.1177/1094428116677299>
- Verina, A., Efendi, N., Zetra, A., Tata, K., Pemilu, K., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Andalas, U. (2019). Proses Intervensi Politik pada Pengangkatan Sekretaris KPU Kota Padang. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(2), 267–281. <https://doi.org/DOI : 10.31604/jips.v6i2.2019.267-281>
- Waterman, R. W., & Meier., K. J. (1998). Principal-Agent Models: An Expansion? *Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART*, 8(2), 173–202.
- Werlin, H. H. (2001). Bureaucracy And Democracy: An Essay In Memory Of Dwight Waldo. *Public Administration Quarterly*, 25(3), 290–315.
- Werlin, H. H. (2008). The Evolution of Political Power in Political Development. *Journal of Developing Societies*, 24(3), 307–336.
- Werlin, H. H. (2012). Political Elasticity (PE) Theory: Doing for the Social Sciences what Darwin did for the Biological Sciences. *Online Journal of Social Sciences Research*, 1(1), 1–11.
- White, L. D. (1926). *Introduction to The Study of Public Administration*. Reprinted by Permission of Prentice Hall, Upper Saddle River.
- Willoughby, W. F. (1918). *The Movement for Budgetary Reform in the States*. D. Appleton and Company for the Institute for Government Research.
- Wilson, W. (1887). The Study of Administration. *Political Science Quarterly*, 2(2), 197–222.

Curriculum Vitae



IDENTITAS DIRI

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | Prof. Dr. Dwiyanto Indiahono, S.Sos., M.Si. |
| 2. Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 3. TTL | Jakarta, 08 September 1980 |
| 4. NIP | 19800908 200501 1 001 |
| 5. NIDN | 0008098003 |
| 6. Pangkat/Golongan | Pembina Tingkat 1/ IVb |
| 7. Jabatan | Guru Besar |
| 8. Bidang Ilmu | Kebijakan Publik |
| 9. Agama | Islam |
| 10. Status | Menikah dengan dr. Baiq Arnany Vandari dengan tiga anak (Fadiya Jauza Zuhra; Fathul Azzam Dhiyaulhaq dan Fakhira Arifah Dzikra) |
| 11. Alamat Rumah | Perumahan Pasir Luhur Permai Komplek Barat No. B530 Pasir Kidul Purwokerto Barat |
| 12. Alamat Kantor | Kampus FISIP UNSOED Jl. Kampus Purwokerto Utara 53122 |
| 13. E-mail | dwiyanto.indiahono@unsoed.ac.id |

RIWAYAT PENDIDIKAN (SD-SMA)

1. SDN 04 Pagi Cipayung Jakarta Timur
2. SDN Kutoharjo 2 Rembang Kabupaten Rembang
3. SMPN 2 Rembang Kabupaten Rembang
4. SMA N 1 Rembang Kabupaten Rembang

RIWAYAT PENDIDIKAN (S1-S3)

No.	Jenjang Pendidikan/Nama Perguruan Tinggi/Kota/Negara	Judul Tugas Akhir	Nama Pembimbing
1.	Program Sarjana Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Jenderal Soedirman	Implementasi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan dan Pengendalian Kelebihan Muatan di UPLLAJ Wilayah Pati (Studi Sosialisasi dan Partisipasi Kelompok Sasaran)	1. Dr. Dyah Retna P., M.Hum. 2. Drs. Suparman SP., M.Si.
2.	Program Magister Ilmu Administrasi Publik (Konsentrasi Kebijakan Publik) - Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada	Model Kerjasama Antar Kabupaten dalam E-Government (Studi Implementasi Pengelolaan Web Site Barlingmascakeb.Com)	1. Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si. 2. Drs. H. Suharyanto, M.Si.
3.	Program Doktor Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada	Dinamika Relasi Pejabat Politik dan Birokrasi Tingkat Lokal pada Era Orde Baru dan Era	1. Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA. [Promotor]

No.	Jenjang Pendidikan/Nama Perguruan Tinggi/Kota/Negara	Judul Tugas Akhir	Nama Pembimbing
		Reformasi (Studi Kasus di Kota Tegal)	2. Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si. [Promotor] 3. Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA. [Ko-Promotor]

KEGIATAN PENGAJARAN

No.	Mata Kuliah yang [pernah dan sedang] diampu	Jenjang	Tempat
1.	Proses dan Formulasi Kebijakan Publik	S1	Administrasi Publik FISIP Unsoed
2.	Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik	S1	Administrasi Publik FISIP Unsoed
3.	Pengantar Administrasi Publik	S1	Administrasi Publik FISIP Unsoed
4.	Pengantar Ilmu Administrasi Negara	S1	Administrasi Publik FISIP Unsoed
5.	Metode Penelitian Sosial	S1	Administrasi Publik FISIP Unsoed
6.	Manajemen dan Kebijakan Pendidikan	S1	Administrasi Publik FISIP Unsoed
7.	Manajemen Kebencanaan	S1	Administrasi Publik FISIP Unsoed
8.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan	S1	Administrasi Publik FISIP Unsoed

No.	Mata Kuliah yang [pernah dan sedang] diampu	Jenjang	Tempat
9.	Administrasi Pembangunan Desa Terpadu	S1	Ilmu Administrasi Negara FISIP Unsoed
10.	Sistem Informasi Manajemen	S1	Administrasi Publik FISIP Unsoed
11.	Kebijakan Publik	S2	Magister Administrasi Publik FISIP Unsoed
12.	Analisis Kebijakan Publik	S2	Magister Administrasi Publik FISIP Unsoed
13.	Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik	S2	Magister Administrasi Publik FISIP Unsoed
14.	Proses dan Formulasi Kebijakan Publik	S2	Magister Administrasi Publik FISIP Unsoed
15.	Teori Kebijakan Publik dan Aplikasinya	S2	Magister Administrasi Publik FISIP Unsoed

PENGALAMAN PENELITIAN

No.	Judul Penelitian	Tahun	Sumber Dana
1.	Model Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MD) di Kabupaten Banyumas	2011	Riset Institusi - Unsoed
2.	Model Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MD) di Kabupaten Banyumas (Tahun Kedua)	2012	Riset Institusi - Unsoed
3.	Uji Model Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MD) pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Banyumas	2013	Riset Institusi - Unsoed
4.	Model Pengembangan Kapasitas Sekretaris dan Staf Desa Berpendidikan SD dan SMP di Kabupaten Brebes	2014	Hibah Bersaing - Kemenristekdikti

- | | | | |
|----|--|------|--------------------------------------|
| 5. | “Sowan” dalam Dinamika Relasi Pejabat Politik dan Birokrasi Pasca Pilkada: Analisis Pengembangan Demokrasi Pancasila | 2019 | Riset Unggulan Unsoed (Pengembangan) |
| 6. | Survey Indeks Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Dunia Digital Kabupaten Banyumas | 2022 | Riset Institusi - Unsoed |

PENGALAMAN MENGIKUTI KONFERENSI INTERNASIONAL [TERBARU]

No.	Judul Makalah	Tahun/Tanggal Pelaksanaan	Tempat/Penyelenggara
1.	Analysis of How Local Online News Media Helped Shape Waste Management Policies in the Aftermath of COVID-19 Pandemic	12-13 Oktober 2022	Purwokerto, Indonesia; The 2nd International Conference on Political, Social and Humanities Sciences (ICPSH), FISIP Universitas Jenderal Soedirman.
2.	Cyberbullying in Local Context: Lessons from Banyumas	26 Oktober 2022	The 3rd Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS) 2022, Faculty of Law, Universitas Riau
3.	Public issues in waste affairs in the pandemic era as a challenge for agile bureaucracy	9 September 2021	Semarang, Indonesia; The 3rd International Conference on Environment, Sustainability Issues, and Community Development, Universitas Diponegoro.
4.	Shifting waste policy issues at the local level: a	24-25 August 2021	Surakarta, Indonesia; The 8th International Conference on Sustainable

No.	Judul Makalah	Tahun/Tanggal Pelaksanaan	Tempat/Penyelenggara
	case study in Banyumas		Agriculture and Environment, Universitas Sebelas Maret.
5.	Designing Policies to Stimulate the Digital Creative Economy for Millennials and Generation Z	18 Oktober 2021	Jakarta, Indonesia; The 3rd International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science (ICoGPASS), STIA Lembaga Administrasi Negara Jakarta.
6.	Resolving Environmental Problems With a Local Online Complaint Mechanism	29 Juli 2021	Malang, Indonesia; The 3rd International Conference on Geography and Education (ICGE), Universitas Negeri Malang.
7.	Public Mission of Local Companies in the COVID-19 Era: Challenges and Obstacles	5 - 6 Agustus 2020	Purwokerto, Indonesia; the 2nd International Conference of Business, Accounting and Economics, ICBAE 2020, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
8.	Anti-Gratification Commitments in Local Regulations on Public Services: Comparative Perspectives	21-22 October 2020	Magelang, Jawa Tengah, Indonesia; The 1st Tidar International Conference on Advancing Local Wisdom Towards Global Megatrends, TIC 2020, Universitas Tidar Magelang.
9.	Ethics of Bureaucracy in Social Media	25-26 November 2020	Purwokerto, Indonesia; The First International Conference on

No.	Judul Makalah	Tahun/Tanggal Pelaksanaan	Tempat/Penyelenggara
	Between Freedom of Expression and Impartiality		Political, Social and Humanities Sciences (ICPSH 2020), FISIP Universitas Jenderal Soedirman.

PUBLIKASI [TERBARU]

No.	Judul Karya Ilmiah/ Artikel	Nama Jurnal/Volume/ Nomor/Halaman	Penerbit	Tahun Terbit
1.	Bureaucratic Neutrality Index in Direct Regional Head Elections: Optimism in Developing Professional Bureaucracy in Indonesia	Jurnal Internasional Bereputasi terindex Scopus Q3 , Public Policy and Administration, Volume 21, Issue 3, Hal: 249-261, October 2022, ISSN: 2029-2872	Mykolas Romeris University and Kaunas University of Technology, Lithuania.	2022
2.	Understanding Sowan as a New Paternalistic Bureaucracy Pattern of Local Officials in Indonesia	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta-2 . Jurnal Bina Praja Volume 14 Issue 02, August 2022. E-ISSN: 2503-3360; Hal: 201–211	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	2022
3.	Dynamics of Bureaucratic Neutrality Policy in Indonesia	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta-2 . Jurnal Borneo Administrator Volume 18 Issue 03, November 2022. E-ISSN:2407-6767; Hal: 309-320	Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD),	2022

No.	Judul Karya Ilmiah/ Artikel	Nama Jurnal/Volume/ Nomor/Halaman	Penerbit	Tahun Terbit
4.	Bureaucratic Reform by Building Trust in Citizens: Best Practices from Local Online Complaints	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta-2 . Policy & Governance Review Volume 5 Issue 2, March 2021. E-ISSN: 2580-4820; Hal: 146-163	Lembaga Administrasi Negara, Indonesia. Association for Public Administration	2021
5.	Hasil Uji Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Banyumas	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta-2 . Kawistara Sekolah Pasca Sarjana UGM Volume 4 Issue 2, April 2014. E-ISSN: 2355-5777; Hal: 39-48	Sekolah Pasca Sarjana UGM	2014
6.	Crown for Women on Empowerment Program: Studies of Important Position of Women in Poverty Alleviation Program in Banyumas	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta-2 . Sodality. Volume 4 Issue 2, July 2016. E-ISSN: 2302-7525; Hal: 176-182	the Department of Communication and Community Development Science, Faculty of Human Ecology IPB	2016
7.	Implementasi Program Pinjaman Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Jurnal Nasional, Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN) Volume 8 No 1, March 2020; Hal: 47-61	Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara	2020

No.	Judul Karya Ilmiah/ Artikel	Nama Jurnal/Volume/ Nomor/Halaman	Penerbit	Tahun Terbit
8.	(UMKM) Di Kabupaten Banyumas Ratio Legis Grand Design Reformasi Birokrasi: Upaya Perbaikan Dimensi Administrasi Publik dari Masa ke Masa	Jurnal Nasional, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Volume 8 No 2, November 2022; Hal: 15-33	the Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya.	2022
9.	Compliance and Conflict of Value in Public Policy Implementation : Comparison between the New Order and the Reformation Era	Jurnal Nasional, Policy & Governance Review Volume 2 No 2, May 2018; Hal: 99-114.	Indonesia Association for Public Administration	2018
10.	Public issues in waste affairs in the pandemic era as a challenge for agile bureaucracy	Prosiding Seminar Internasional, Terindex Scopus . IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 896, November 2021; Hal: 1-4.	IOP Conference Series: Earth and Environmental Science	2021
11.	Shifting waste policy issues at the local level: a case study in Banyumas	Prosiding Seminar Internasional, Terindex Scopus . IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 905, November 2021; Hal: 1-4.	IOP Conference Series: Earth and Environmental Science	2021

No.	Judul Karya Ilmiah/ Artikel	Nama Jurnal/Volume/ Nomor/Halaman	Penerbit	Tahun Terbit
12.	Designing Policies to Stimulate the Digital Creative Economy for Millennials and Generation Z	Prosiding Seminar Internasional, Terindex WoS . KnE Social Sciences, Volume 2022, May 2022; Hal: 86-94.	KnE Social Sciences	2022
13.	Resolving Environmental Problems With a Local Online Complaint Mechanism	Prosiding Internasional, Terindex WoS . KnE Social Sciences, Volume 2022, October 2022; Hal: 23-28.	KnE Social Sciences	2022
14.	Public Mission of Local Companies in the COVID-19 Era: Challenges and Obstacles	Prosiding Internasional, Terindex Scopus dan WoS . EAI - EUDL, April 2021.	EAI - EUDL	2021
15.	Anti-Gratification Commitments in Local Regulations on Public Services: Comparative Perspectives	Prosiding Internasional, Terindex Scopus dan WoS . EAI - EUDL, April 2021.	EAI - EUDL	2021
16.	Ethics of Bureaucracy in Social Media Between Freedom of Expression and Impartiality	Prosiding Seminar Internasional. FISIP Unsoed. ISBN: 978-623-6783-36-8 ISBN: 978-623-6783-37-5 (PDF), 2020; Hal: 86-92.	FISIP Unsoed	2020

No.	Judul Karya Ilmiah/ Artikel	Nama Jurnal/Volume/ Nomor/Halaman	Penerbit	Tahun Terbit
17.	Formatting State Direction in the Context of Indonesia Presidential System	Prosiding Seminar Internasional, Scitepress.org Volume: Vol. 1 - 978-989-758-458-9 September 2018. ISBN: 978-989-758-458-9; Hal: 949-955.	Scitepress.org	2018
18.	Kepemimpinan Transformatif Kepala Desa dalam Pengembangan Networking Menuju Desa Wisata Berkelanjutan	Prosiding Seminar Nasional, Universitas Jenderal Soedirman, July 2022. ISBN:978-623-465-038-9. Hal: 117-123.	Universitas Jenderal Soedirman	2022
19.	Big Data dan Analisis Kebijakan Publik	Book Chapter: Administrasi Publik New Normal, ISBN 978-623-6793-40-4, Oktober 2020; Hal: 25-49.	SIP Publisher	2020
20.	Pembangkangan Elit Lokal Terhadap Kebijakan Pencegahan Penularan Covid-19 dan Debat Public Value Dalam Implementasi Kebijakan Publik	Book Chapter: Lara Pandemi Covid 19: Perdebatan Penanggulangan, Kebijakan dan Implikasi Sosial, ISBN 978-602-1585-15-3, 2021.	IAPA Kalsel	2021
21.	Digitalisasi Pelayanan Publik di Desa: Tantangan dan Peluang	Book Chapter: Pemberdayaan Masyarakat: Dialektika Partisipasi Publik dan Pembangunan, ISBN	SIP Publisher	2022

No.	Judul Karya Ilmiah/ Artikel	Nama Jurnal/Volume/ Nomor/Halaman	Penerbit	Tahun Terbit
	Kebijakan	978-623-337-803-1, November 2022; Hal: 194-212.		

BUKU

No.	Judul Buku	Penerbit	ISBN	Tahun Terbit
1.	Kebijakan dan Pelayanan Publik Berbasis Keadilan Sosial di Era Disrupsi dan Big Data (Editor: Ketua: Dwiyanto Indiahono; Anggota: Tobirin)	SIP Publishing: Banyumas	978-623-337-498-9	2021
2.	Administrasi Publik New Normal (Ketua: Prof. Dr. Slamet Rosyadi, M.Si.; Anggota Dwiyanto Indiahono).	SIP Publishing: Banyumas	978-623-6793-29-9	2020
3.	Mengenal Sukuk Negara: Instrumen Pembiayaan APBN dan Sarana Investasi Masyarakat. (Editor Ketua: Eri Harianto, M.Si; Anggota Dwiyanto Indiahono).	Gava Media: Yogyakarta	978-602-6948-75-5	2017
4.	Kebijakan Publik dan Modal Sosial: Studi Implementasi Kebijakan sebagai Arena Pemberdayaan.	Penerbit Universitas Jenderal Soedirman: Purwokerto	978-602-1004-59-3	2017

No.	Judul Buku	Penerbit	ISBN	Tahun Terbit
5.	Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis (Edisi Kedua Revisi).	Gava Media: Yogyakarta.	978-602-6948-64-9	2017
6.	Birokrat [Bukan] Pelayan Koruptor.	Gava Media: Yogyakarta.	978-602-7869-87-5	2016
7.	Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis.	Gava Media: Yogyakarta.	978-979-1078-91-7	2009
8.	Perbandingan Administrasi Publik: Model Konsep dan Aplikasi.	Gava Media: Yogyakarta.	978-602-6948-64-9	2009
9.	Public Disobedience: Telaah Penolakan Publik terhadap Kebijakan Pemerintah	Gava Media: Yogyakarta.	978-979-1078-54-2	2009
10.	Reformasi “Birokrasi Amplop”: Mungkinkah?.	Gava Media: Yogyakarta.	979-3469-92-7	2006

PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

No.	Judul Penyuluhan	Sumber Dana	Tempat Pelaksanaan	Tahun
1.	Kebijakan Publik Dinamis di Era Pandemi	Mandiri	BEM FISIP Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto	Sabtu, 19 Juli 2021
2.	Anggaran Publik di Era Pandemi	Mandiri	“Dialog Dinamika Kita” RRI Purwokerto	Senin, 21 September 2020
3.	Menggali Ide Karya Tulis Ilmiah	Mandiri	Aula Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto	Kamis, 31 Oktober 2019

- | | | | | |
|----|-------------------------------|---------|--|--------------------------|
| 4. | Proses
Kebijakan
Publik | Mandiri | Sekolah Teori Sosial
UKM Rhizome
FISIP Universitas
Jenderal Soedirman | Minggu, 31
Maret 2019 |
|----|-------------------------------|---------|--|--------------------------|

PRESTASI

1. Juara II Dosen Berprestasi Bidang Sosial Humaniora Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2019.
2. Juara I Dosen Berprestasi FISIP Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2019.
3. Juara I Dosen Berprestasi FISIP Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2009.
4. Lulusan Terbaik Ketiga Wisuda MAP Universitas Gadjah Mada Tanggal 25 April 2006.

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Koordinator Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Jenderal Soedirman (2021 s/d sekarang).
2. Kepala Laboratorium Komputer FISIP Universitas Jenderal Soedirman (2019 s/d 2021)
3. Kepala Laboratorium Manajemen dan Kebijakan Pembangunan (LMKP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (2009 – 2014).
4. Anggota Dewan Pengurus Pusat [DPP] Indonesian Association For Public Administration (IAPA) (2020 s/d sekarang).
5. Pendiri dan Pegiat Indonesia for Bureaucratic Reform [INBRIEF] (2020 s/d sekarang).
6. Associate Editor Jurnal Q1 Humanities and Social Sciences Review (2021).
7. Reviewer Public Policy and Administration (PPA) Q3 Journal (2022 s/d sekarang).
8. Reviewer Policy and Governance Review Journal – Indonesian Association for Public Administration [IAPA] (2019 s/d sekarang).
9. Reviewer Jurnal Bina Praja Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia – Jurnal Sinta 2 (2018 s/d sekarang).

10. Reviewer Jurnal Borneo Administrator – Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara – Jurnal Sinta 2- P3KDOD Lembaga Administrasi Negara (2019 s/d sekarang).
11. Reviewer Jurnal Pendidikan Geografi Jurnal Sinta 2 - Universitas Negeri Malang – (2022 s/d sekarang).
12. Reviewer Jurnal Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2019 s/d sekarang).
13. Dewan Redaksi Jurnal Bestuurskunde – Jurnal Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2021 s/d sekarang).
14. Dewan Redaksi Jurnal Public Policy and Management Inquiry FISIP Universitas Jenderal Soedirman (2020 s/d sekarang).
15. Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin Perumahan Pasir Luhur Permai Pasir Kidul Purwokerto Barat.
16. Anggota Dewan Pembina Yayasan Darul Furqon Purwokerto.
17. Anggota dan Pengurus Jaringan Santri Pengusaha (JSP) Lajnah Dakwah Nurul Huda Purbalingga.
18. Pendiri dan Ketua Umum [Pertama] Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara [HMJ-AN) FISIP Universitas Jenderal Soedirman.
19. Sekretaris Umum dan Kepala Bidang Dakwah Unit Kerohanian Islam (UKI) FISIP Universitas Jenderal Soedirman.
20. Presidium Badan Pemberdayaan Kontrol dan Advokasi (BPKA) FISIP Universitas Jenderal Soedirman.

Purwokerto, 23 November 2023



Prof. Dr. Dwiyanto Indiahono, S.Sos., M.Si.
NIP. 19800908 200501 1 001



UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. H.R. Boenyamin 708 Purwokerto

Kode Pos 53122 Kotak Pos 115

Telepon 635292 (Hunting) 638337, 638795

Faksimile 631802

www.unsoed.ac.id

Scan di sini
untuk Mendapatkan
5 Buku Orasi Ilmiah



<https://s.id/bukuorasiilmiah23Nov>